

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka atau tinjauan literatur merupakan ringkasan yang diambil dari penelitian terdahulu seperti dari jurnal, buku, artikel, internet dan dokumen yang menjelaskan perihal yang bersangkutan dengan topik penelitian yang ingin diteliti saat ini.

1. Penelitian pertama yang berjudul “PERAN PASUKAN GARUDA DALAM OPERASI PENGAWASAN PERDAMAIAN PADA KONFLIK ANTARA ISRAEL-HIZBULLAH TAHUN 2014-2015” karya Ninda Wahyu, Ganjar Widhiyoga dan Hasna Wijayati dari Review of Internasional Relations pada tahun 2021. Tujuan utama dari makalah ini adalah untuk menyajikan deskripsi dan analisis yang menyeluruh mengenai partisipasi Indonesia dalam operasi perdamaian selama konflik Israel-Hizbullah di Lebanon. Keterlibatan ini terutama melibatkan pengerahan Pasukan Garuda, menandakan peran aktif Indonesia dalam usaha penyelesaian konflik. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup teori diplomasi pertahanan dan konsep keamanan internasional. Metodologi penelitian ini berfokus pada penelitian kualitatif, menggunakan sumber data primer dan sekunder yang relevan dengan tema penelitian. Pendekatan penelitian kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dalam analisis data, dilakukan reduksi data dan teknik analisis data, termasuk metode verifikasi data. Temuan

penelitian menunjukkan bahwa pembentukan keamanan internasional memerlukan agenda yang berbeda, terutama dalam situasi khusus. Hasil penelitian ini menggambarkan operasi pemantauan perdamaian yang dilakukan oleh Indonesia melalui Pasukan Garuda selama konflik Israel-

Hizbullah di Lebanon sebagai ekspresi dari kepentingan nasional yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam pembukaan UUD 1945. Selain itu, ini juga mencerminkan keterlibatan konsisten Indonesia dalam usaha pemeliharaan perdamaian global sebagai bagian dari kebijakan luar negerinya. Sebagai konsekuensinya, ada potensi untuk meningkatkan efektivitas upaya diplomasi pertahanan Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, terdapat kesamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis. Persamaan dalam penelitian ini adalah Level analisa yang digunakan yaitu negara dimana kedua penelitian menggunakan Lebanon sebagai negara konflik nya dan Indonesia sebagai negara yang berperan di dalamnya kemudian kesamaan pada konsep keamanan internasional dan metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya merupakan Teori yang digunakan pada penelitian tersebut menggunakan teori diplomasi sedangkan peneliti menggunakan teori organisasi internasional dan perbedaan dalam penugasan Kontingen Garuda atau Pasukan Garuda.

2. Penelitian kedua yang berjudul “DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA MELALUI KONTINGEN GARUDA/UNIFIL TENTARA NASIONAL INDONESIA DI LEBANON SELATAN” karya Angga Nurdin Rachmat.

Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan upaya penerimaan pasukan Garuda ke dalam Lebanon terutama di kawasan yang berkonflik dengan menggunakan praktik diplomatik khusus diplomasi publik. Penelitian ini mengadopsi kerangka teori diplomasi publik dan

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi literatur sebagai sumber data. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan fenomena yang berbeda dalam upaya memperoleh persetujuan dan kontrol atas kontak-kontak tersebut, baik dalam kontingen UNIFIL maupun dalam masyarakat Indonesia. Menerima kontingen UNIFIL dari beberapa negara oleh penduduk Lebanon Selatan menimbulkan tantangan yang signifikan. TNI, yang saat ini berpartisipasi dalam misi perdamaian PBB di Lebanon, memiliki peran penting dalam diplomasi publik. Oleh karena itu, TNI harus meningkatkan kemampuan diplomatiknya untuk mencapai penerimaan yang positif di antara penduduk Lebanon. Kesimpulan dari penelitian ini adalah praktik diplomasi publik cukup penting dilakukan oleh negara yang ingin membantu negara yang sedang berkonflik dikarenakan harus ada tindakan, sikap dan pertimbangan dalam hal penerimaan terutama dalam hal sosial seperti penerimaan masyarakat disana terhadap pasukan Garuda agar kedua belah pihak dapat saling memahami. Oleh karena itu pendekatan dengan menggunakan diplomasi publik yang merupakan soft power terhadap kawasan yang sedang berkonflik cukup krusial.

Dari hasil penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaan dengan peneliti adalah metode yang

digunakan adalah metode kualitatif dan membahas upaya kontingen Garuda di Lebanon. Sedangkan perbedaannya merupakan penggunaan dalam teori yang digunakan dalam penelitian tersebut merupakan diplomasi publik sedangkan peneliti menggunakan teori organisasi internasional dan peneliti menggunakan konsep keamanan internasional dan *peacekeeping*. Penelitian tersebut lebih memfokuskan kepada diplomasi publik melalui Kontingen Garuda.

3. Penelitian Ketiga yang berjudul “KONTRIBUSI INDONESIA DALAM PEACEKEEPING MISSION DI LEBANON SEBAGAI IMPLEMENTASI DIPLOMASI PERTAHANAN” karya Tsabita Afifah Khoirunnisa dari Jurnal Tranformasi Global Vol. 9 No. 1 pada tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan diplomasi pertahanan sebagai implementasi terhadap kontribusinya Indonesia dalam misi *peacekeeping* di Lebanon. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori diplomasi pertahanan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Indonesia melakukan diplomasi pertahanan sebagai wujud implementasi dalam tujuan PBB untuk menjaga perdamaian dunia. Indonesia yang selaku negara yang merupakan anggota PBB memberikan citra baik dan turut menjaga Hak Asasi Manusia (HAM) dengan cara diplomasi berupakan militer.

Kesimpulan dari penelitian ini merupakan diplomasi pertahanan Indonesia dalam *peacekeeping* merupakan salah satu cara meningkatkan kepercayaan dan kapabilitas pertahanan negara.

Dari hasil penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaan dengan peneliti adalah kontribusi Indonesia dalam melakukan misi peacekeeping di Lebanon kemudian kesamaan dalam metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah teori yang digunakan oleh peneliti adalah teori diplomasi pertahanan sedangkan penulis menggunakan teori organisasi internasional dan fokus dari penelitian terdahulu tersebut lebih ke diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia terhadap Lebanon.

2.2. Kerangka Teori

2.2.1. Teori Organisasi Internasional

Organisasi internasional adalah manifestasi dari upaya kolaboratif yang melampaui batas-batas negara, yang ditandai dengan kerangka kerja organisasi yang terdefinisi dengan baik dan pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan yang bertujuan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Struktur organisasi dibentuk dengan ruang lingkup yang terdefinisi dengan baik dan menjalankan fungsi yang berkelanjutan untuk secara aktif mengupayakan pencapaian tujuan yang telah disepakati bersama. Tujuan-tujuan ini ditetapkan antara pemerintah dan badan-badan pemerintah dan non-pemerintah lainnya di dalam negeri. Berbagai pemerintah dan organisasi non-pemerintah di berbagai negara.¹²

¹² Rudy, T. May. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung : Bina Cipta. 1996. hlm. 3.

Organisasi dengan cakupan internasional memiliki peran penting dalam memfasilitasi kerja sama di antara pemerintah-pemerintah dalam berbagai bidang, menghasilkan manfaat bagi sebagian besar, jika tidak semua, anggotanya. Selain itu, lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai wadah untuk mengambil keputusan yang terkait dengan upaya kolaboratif. Proses pengambilan keputusan mengenai kerja sama ini tidak hanya difasilitasi, tetapi juga menyediakan sumber daya administratif yang diperlukan untuk pelaksanaan resolusi secara efektif. Alat-alat administratif digunakan untuk menjalankan keputusan-keputusan tersebut dengan efisien, sementara organisasi-internasional menyediakan berbagai saluran interaksi antar pemerintah, membantu dalam aksesibilitas jika terdapat permasalahan yang muncul.¹³

Kehadiran organisasi global ini sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan hukum internasional di masa kini. Peran organisasi internasional sebagai badan hukum internasional yang memfasilitasi proses penciptaan hukum internasional dapat dipahami sebagai mekanisme untuk menegaskan sifat imperatif dari norma-norma hukum internasional. Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan suatu organisasi sebagai organisasi internasional. Kriteria-kriteria tersebut antara lain:¹⁴

¹³ Bennet, Leroy. *International Organization, Principle and Issue*. New York : Jersey :Partice Hall Inc. 1995. hlm. 3.

¹⁴ Clive Archer. *International Organization, Third Edition*. New York : Routledge. 2001. hlm. 24.

1. Tujuan haruslah merupakan tujuan internasional
2. Harus mempunyai anggota
3. Didirikan berdasarkan pada anggaran dasar dan harus mempunyai markas besar demi kelangsungan organisasi

4. Pejabat/pegawai yang mempunyai tugas menjalankan pekerjaan organisasi harus terdiri dari berbagai bangsa/negara
5. Organisasi harus berdiri sendiri (*Independent*) dan harus masih aktif

Menurut Clive Archer, organisasi internasional adalah pengaturan formal yang bertahan lama yang dibentuk melalui perjanjian atau traktat antara beberapa negara berdaulat. Organisasi-organisasi ini bertujuan untuk mencapai tujuan atau keinginan bersama di antara negara-negara yang berpartisipasi.¹⁵ Organisasi internasional memiliki sebuah kewajiban yang signifikan dalam menerapkan, mengawasi dan menengahi suatu konflik yang lahir dari adanya beberapa keputusan yang diciptakan oleh negara.¹⁶

Dalam situasi ini PBB dan UNIFIL, dapat dikategorikan sebagai organisasi internasional karena PBB dan UNIFIL merupakan manifestasi dari upaya kolaboratif yang melampaui batas-batas negara. Terbentuknya UNIFIL sebagai salah satu organisasi internasional dikarenakan respon dari PBB dengan apa yang terjadi dikawasan Timur Tengah terkhususnya

¹⁵ Cliver Archer. *International Organization*. London. 1983. hlm. 35.

¹⁶ Paul R. Viotti & Mark V Kauppi. *International Relations Theory : Realism, Pluralism, Globalism and Beyond*. New York : Allyn & Bacon. 1993. hlm. 228.

Lebanon Selatan untuk menjaga stabilitas kawasan dan untuk mencapai dan menjaga perdamaian.

Dalam kasus ini, teori organisasi digunakan agar memberikan pemahaman terkait peran UNIFIL dalam dinamika kawasan di Lebanon Selatan. Dalam hal ini juga tanpa adanya UNIFIL sebagai sebuah respon dari apa yang sedang terjadi di Lebanon, sebuah negara tidak dapat langsung mengirimkan pasukan perdamaian mereka tanpa adanya sebuah kesepakatan UNIFIL, apabila terdapat sebuah negara mengirimkan pasukan perdamaian yang dimana negara tersebut tidak termasuk kedalam keanggotaan UNIFIL, maka negara tersebut telah mengintervensi kedaulatan sebuah negara. UNIFIL juga dibentuk untuk mencapai perdamaian dan menjaga stabilitas keamanan di Lebanon. Tak hanya itu anggota yang tergabung di UNIFIL harus memberikan sedikit kedaulatan mereka agar tugas dan misi-misi dari UNIFIL dapat dijalankan yang dimana kedaulatan tersebut merupakan kemiliteran dari negara yang tergabung yakni pasukan perdamaian.

2.2.2. Konsep Keamanan Internasional

Keamanan merupakan hal yang harus dilindungi dan dipegang oleh masing-masing negara, individu ataupun lingkungan sekitar. Konsep keamanan internasional terjadi karena berhubungan dengan konsep keamanan nasional yang pada hasilnya saling berdampak bukan mewakili.¹⁷

¹⁷ Barry Buzan & Lene Hansen. *The Evolution of International Security Studies*. New York: Cambridge University Press. 2009. hlm. 156

Konsep keamanan umumnya berfokus pada ancaman teritorial dan hubungannya yang erat, meskipun tidak mengecualikan kemungkinan adanya ancaman non-teritorial.¹⁸ Validitas konsep keamanan terus menjadi subjek penelitian dan perdebatan. Selama era Perang Dingin, para akademisi

yang mengkhususkan diri dalam studi perdamaian menyuarakan bahwa memberikan perhatian yang sama terhadap nilai-nilai kemanusiaan mendasar sangatlah penting. Akibatnya, konsep keamanan internasional berkembang untuk mencakup gagasan yang lebih luas tentang keamanan sektoral. Pendekatan ini menggabungkan berbagai dimensi seperti sosial, ekonomi, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, dan gender. Domain keamanan internasional ditandai oleh perhatian yang berbeda dalam menangani dan mengelola kepentingan antarnegara melalui perspektif keamanan, terutama dalam menghadapi tantangan yang menimbulkan risiko mendasar terhadap eksistensi. Oleh karena itu, konsep keamanan internasional secara inheren terhubung dengan kebutuhan untuk menjamin kelangsungan hidup.¹⁹

Penulis menggunakan konsep keamanan internasional dalam menganalisis upaya kontingen Garuda di Lebanon. Dengan menggunakan konsep ini maka penulis akan mengajukan pendekatan yang lebih luas terhadap pemahaman terkait keamanan dikarenakan keamanan disini tidak hanya berkaitan dengan keamanan militer saja akan tetapi juga aspek-aspek

¹⁸ Barry Buzan & Ole Waver. *Regions and Powers The Structure of International Security*. New York: Cambridge University Press. 2004. hlm. 43-45

¹⁹ Ken Booth. *Theory of World Security*. New York : Cambridge University Press. 2008. hlm. 95

lain seperti keamanan sosial. Dalam hal ini, pasca konflik besar antara Israel bagian Utara dan Lebanon bagian Selatan pada tahun 2006 masih dapat terjadi ketegangan dalam hal militer dan juga dalam hal sosial diwaktu-waktu sekarang. Dalam hal sosial disini merupakan bagian negara Lebanon.

2.2.3 Konsep *Peacekeeping*

Penelitian ini menerapkan kerangka teori pemeliharaan perdamaian untuk menjelaskan upaya Kontingen Garuda dalam operasi pemeliharaan perdamaian di Lebanon. Konsep pemeliharaan perdamaian dirumuskan dengan tujuan mempertahankan keamanan di tengah konflik, mendukung implementasi kesepakatan yang ditengahi oleh mediator, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perdamaian berkelanjutan.²⁰ Perkembangan operasi pemeliharaan perdamaian telah menempuh jalan yang lebih kompleks dengan melibatkan integrasi berbagai unsur militer, polisi, dan sipil. Dampaknya telah mempengaruhi kemajuan TNI dalam terlibat dalam misi pemeliharaan perdamaian.

Terdapat beberapa prinsip-prinsip dalam *peacekeeping*, yakni :²¹

1. *Peacekeeping* sebagai operasi yang bentuk PBB, dapat diterima disetiap negara anggota dimana terdapat pasukan luar yang berada dikawasan konflik tersebut.

²⁰ United Nations Peacekeeping. "What is Peacekeeping?", Diakses pada 7 Juli 2023. <http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/peacekeeping.shtml>

²¹ United Nations Peacekeeping, "Principles of UN Peacekeeping", Diakses pada 7 Juli 2023. <http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/principles.shtml>

2. *Peacekeeping* dapat dilaksanakan dengan memusatkan kepada pihak-pihak yang sedang berkonflik, tak hanya itu juga harus memusatkan pada upaya membentuk kerjasama diantara pihak-pihak yang berkonflik.

3. *Peacekeepers* harus bersikap netral dan pasukan PBB tidak boleh memaksa kepentingan 1 kelompok terhadap kelompok yang lain.

4. Dalam upaya pemeliharaan perdamaian, setiap negara anggota memiliki tanggung jawab untuk mematuhi kewajiban mereka dengan menyediakan personel militer untuk misi pemeliharaan perdamaian.

5. *Use of Force*, bermakna bahwa diperbolehkan menggunakan kekuatan bersenjata akan tetapi harus seminimal mungkin, dalam keadaan tertentu dan sebagai Upaya pembelaan diri

Dalam mencapai tujuan tersebut, operasi pemeliharaan perdamaian memiliki beberapa kekuatan utama. Pertama, mereka memiliki legitimasi yang kuat karena didukung dan diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi regional lainnya, yang meningkatkan kredibilitas dan otoritas mereka di tingkat internasional. Kedua, operasi pemeliharaan perdamaian menerapkan pembagian beban di antara beberapa negara, yang mengurangi beban keuangan dan logistik pada satu negara serta mendorong tanggung jawab bersama. Ketiga, kemampuan mereka untuk mengumpulkan pasukan dan personel polisi dari berbagai negara dengan keahlian yang berbeda memungkinkan mereka untuk menghadapi tantangan dengan cara yang lebih luas dan efektif. Keempat, operasi pemeliharaan perdamaian mengintegrasikan personel sipil dengan keahlian berbeda untuk

mengatasi tantangan multidimensi dalam lingkungan pasca-konflik. Akhirnya, operasi pemeliharaan perdamaian fokus pada mandat multidimensi, yang mencakup pemeliharaan keamanan, dukungan politik, dan pembangunan perdamaian untuk mencapai kondisi perdamaian yang berkelanjutan.

Terdapat lima faktor yang mendorong negara-negara untuk terlibat dan menyumbangkan pasukan pada misi penjaga perdamaian PBB. yakni :

1) Politik

Keterlibatan sebuah negara dalam menyediakan personel militer untuk operasi pemeliharaan perdamaian memiliki potensi untuk mencapai tujuan politik. Alasannya adalah bahwa negara-negara yang berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dapat memperoleh penghargaan dan mendapatkan kekuasaan untuk menyuarakan isu-isu keamanan dalam kanvas global.²² Terlebih lagi, terdapat berbagai faktor politis yang mendorong beberapa negara untuk menyumbangkan pasukan militer mereka dalam misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Faktor-faktor tersebut mencakup pengaruh eksternal, seperti tekanan atau undangan dari negara-negara berpengaruh dan Sekretaris Jenderal PBB, serta motivasi internal, seperti keyakinan bahwa

²² Arturo C. Sotomayor. *Why Some States Participate in UN Peace Missions While Other Do Not : An Analysis of Civil-Military Relations and Its Effects on Latin America's Contributions to Peacekeeping Operations*. *Security Studies*, Vol. 19, No. 1. 2010. hlm. 4-6

partisipasi dalam operasi perdamaian dapat meningkatkan posisi dan reputasi suatu negara.²³

2) Ekonomi

Partisipasi negara-negara dalam menyediakan personel militer untuk operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan memberikan insentif ekonomi berupa anggaran kompensasi PBB yang diberikan kepada negara-negara yang menyumbangkan tentara dalam misi tersebut.

3) Keamanan

Kaitan antara operasi perdamaian PBB dan pertahanan nasional atau isu keamanan nasional tidak selalu terlihat dengan jelas. Negara-negara sering melihat kontribusi pasukan mereka kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai upaya untuk memajukan tujuan keamanan nasional secara keseluruhan.²⁴ Dalam konteks ini, tingkat risiko dalam pertempuran tertentu dapat menjadi faktor kunci dalam menentukan tingkat kepastian kontribusi seseorang. Penerimaan kontribusi dari negara-negara yang berdekatan sangat dipengaruhi oleh kedekatan geografis.

4) Institusi

Motivasi untuk ikut serta dalam operasi pemeliharaan perdamaian bisa muncul dari minat pribadi untuk terlibat dalam

²³ Trevor Findlay. *Challenges for The New Peacekeepers*. SIPRI Research Report No.12. Oxford University Press. 1996. hlm. 2

²⁴ *Ibid.*

angkatan bersenjata, sektor keamanan, dan aspek birokrasi negara. Keinginan untuk berpartisipasi dalam operasi perdamaian biasanya terbentuk dalam konteks interaksi antara sektor sipil dan militer.²⁵ Kontribusi suatu negara terhadap operasi dipengaruhi oleh kualitas,

ukuran, dan struktur pasukan militer mereka. Selain itu, militer biasanya melihat operasi perdamaian yang diorganisir oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai lembaga internasional yang dihormati, yang memberikan eksposur yang signifikan di seluruh dunia bagi warga negaranya.

5) Norma

Keputusan negara untuk terlibat dalam operasi pemeliharaan perdamaian didasarkan pada pembenaran normatif. Alasan yang disebutkan di atas terutama berkaitan dengan dorongan untuk mengidentifikasi diri sebagai "pelaku global yang peduli", "warga dunia yang bertanggung jawab", atau sebagai anggota blok non-blok yang mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai cara untuk menjaga keseimbangan kekuasaan besar, tanpa mengesampingkan nilai-nilai moralnya. Sebagai negara kontributor, Indonesia secara normatif berkomitmen untuk mewujudkan tujuan keamanan dan perdamaian PBB, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945.

²⁵ *Ibid.*

Penulis juga menggunakan konsep *peacekeeping* dalam menganalisa kenapa sebuah negara mau terlibat atau berpartisipasi dalam misi perdamaian di Lebanon dan juga *peacekeeping* merupakan bentuk dari sebuah resolusi konflik pasca konflik antara Israel dan Lebanon yang dibentuk oleh PBB.

2.3 Kerangka Pemikiran

